

## **PENGEMBANGAN KONSEP *E-GOVERNMENT SYARIAH* BERBASIS *FIQIH SIYASAH***

Darius Antoni<sup>1</sup>, Siti Rahma Tiya<sup>2</sup>  
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma  
**E-mail:** darius.antoni@binadarma.ac.id<sup>1</sup>, rahmatiya71@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Konsep *E-government* merupakan memberikan pelayanan kepada publik demi terjalinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih sering terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang di harapkan dengan informasi yang di sajikan oleh pemerintah terutama memalui media elektronik. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peluang menciptakan pelayanan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut *e-government*. Konsep *e-government* dalam tinjauan Hukum Islam lebih mengarah kepada bagaimana cara mendayagunakan metode yang ditawarkan dalam Ilmu Ushul Fiqih untuk merumuskan asas-asas Hukum Islam untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi dalam pemerintahan. Pengendalian merupakan hal yang harus dilakukan agar tujuan yang telah direncanakan dapat dilakukan dengan maksimal dalam mencapai target yang di inginkan. Sedangkan Pelaksanaan suatu mekanisme atau intraksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terliabat. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam pekerjaan, kebijakan harus ada dalam kehidupan bernegara. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan Analisa dan mengacu pada data, atau bisa dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dalam pengembangan sistem ini menggunakan *Framework Laravel* dan *MySQL* sebagai *Database*. Dengan menggunakan Model MVC (*Model View Controller*) hasil dari penelitian ini merupakan aplikasi pelayanan terpadu berbasis *website* guna untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan kontroling baik dalam semua kegiatan maupun transparansi dana. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi serta dalam aplikasi ini juga terdapat layanan publik yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi mau pun menyampaikan pendapat ke pemerintahan.

Kata Kunci : *E-Government, Fiqih Siyasa, Framwork Laravel*

### **ABSTRACT**

The concept of e-government is to provide services to the public for the sake of communication between government and society. However, there is often an imbalance between the expected information and the information presented by the government, especially through electronic media. Therefore, the government takes the opportunity to create quality services by utilizing information technology called e-government. The concept of e-government in the view of Islamic law is more directed at how to use the methods offered in Ushul Fiqh to formulate Islamic law principles to respond to various problems that occur in government. Control is something that must be done so that the goals that have been planned can be carried out optimally in achieving the desired targets. While the implementation of a mechanism or interaction between the government and the community and parties involved. Policy is a series of concepts and principles to be a line of

implementation in work, policies must exist in the life of the state. In this study using descriptive qualitative methods that use analysis and refer to data, or it can be done by means of interviewing and observation. In developing this system using the Laravel Framework and MySQL as the Database. By using the MVC Model (Model View Controller) the results of this study are a website-based integrated service application in order to make it easier for the government to control both in all activities and transparency of funds. In addition, this application is also designed to make it easier for the public to participate and in this application there are also public services that function to make it easier for people to communicate and express opinions to the government.

**Keywords:** E-Government, Fiqh Siyasa, Laravel Framework

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat. Setiap orang memerlukan teknologi untuk kebutuhan yang harus dimiliki contohnya teknologi informasi yang di manfaatkan oleh masyarakat dalam mendapat kan informasi saat ini. Sehingga pemerintah membuat keputusan untuk menciptakan layanan yang berkualitas dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang sering di sebut dengan *e-government*. Seringkali *Government* dan *governance* dianggap memiliki satu pengertian yang sama contohnya bagaimana proses dalam menerapkan kekuasaan dalam organisasi, lembaga maupun negara. Tetapi istilah dari *e-government* dan *governance* memiliki makna yang berbeda. *Government* (pemerintahan) bermakna pada suatu kekuasaan di dalam negara. Sedangkan makna *governance* merupakan prosedur serta tata cara pemerintah untuk masyarakat dalam mengendalikan dan memecahkan masalah publik.[1]

Kota Palembang merupakan kota yang sudah mengimplementasikan *e-government* dalam membantu berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang telah banyak membuat aplikasi salah satunya yaitu Sidemang dan Hallo Palembang. Sidemang merupakan akronim dari sistem informasi administrasi online masyarakat kota Palembang. Aplikasi Sidemang merupakan salah satu halaman website Hallo Palembang yang digunakan masyarakat secara mudah dalam pengurusan berkas tanpa harus datang ke kantor pemerintahan, masyarakat juga bisa mencetak sendiri berkasnya. Walaupun Kota Palembang telah mengimplementasikan banyak aplikasi *e-government* tetapi aplikasi-aplikasi tersebut belum mendukung visi Kota Palembang yaitu menjadi Palembang Emas Darusalam. Palembang Emas Darusalam yang memiliki dua kata yaitu EMAS yang mempunyai arti Elok Madani, Aman dan Sejahtera. Sedangkan kata DARUSSALAM mempunyai makna yaitu Kota Palembang akan menjadi Kota yang Aman, Damai, Makmur serta Sejahtera dengan keharmonisan antara kehidupan manusia dan alam. Untuk mendukung pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Emas Darusalam dibutuhkan suatu konsep *e-government* berbasis syariah.[2]

Selain permasalahan di atas, jadi dibutuhkan suatu sistem *e-government* menurut administrasi Islam yaitu pengendalian, pelaksanaan dan kebijakan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka akan dikembangkan menggunakan pendekatan *maslahat mursalah* atau *fiqh siyasah*. Dalam ilmu *fiqh siyasah* membahas cara mengatur tata negara secara Islam contohnya cara untuk menerapkan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang sesuai dalam prinsip Islam untuk menciptakan kemaslahatan umum. Dari penjelasan di atas maka penelitian ini akan mengangkat judul yaitu “*Pengembangan Konsep E-Government Syariah Berbasis Fiqh Siyasah*” yang mengacu pada Visi yang ada di Kota Palembang yaitu Palembang Emas Darusalam.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

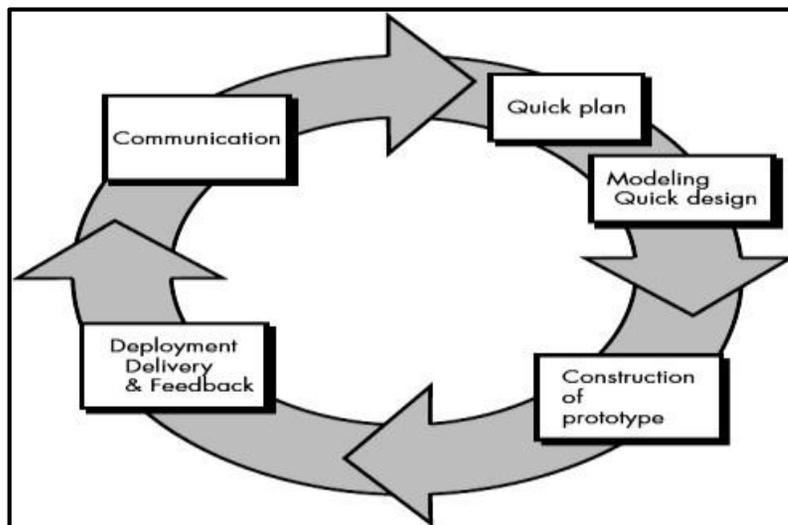
### 2.1 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Pengamatan (*Observasi*) yaitu melakukan pengamatan *e-government* yang sudah ada di Kota Palembang untuk mendapatkan gambaran umum situasi implementasi *e-government* di Kota Palembang.
- b. Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada beberapa masyarakat contohnya Alim Ulama untuk mengetahui Hukum secara Islam.
- c. Dokumentasi (*Documentation*) merupakan *document* atau tulisan jadi dapat diartikan metode dokumentasi berarti pengumpulan data dengan cara mencatat atau *merecord* data-data yang ada. Metode dokumentasi ini merupakan data yang berubungan dengan hal-hal atau variabel contohnya buku catatan, surat, transkrip surat atau berupa artikel di internet dan laporan yang sesuai dengan permasalahan.

### 2.2 Metode Pengembangan Sistem

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode pengembangan sistem dengan model *Prototype*. *Prototype* adalah sebuah metode pengembangan *software* yang banyak digunakan pengembang agar dapat saling berinteraksi dengan pelanggan selama proses pembuatan sistem [7].



Gambar 1. Siklus Hidup Metode Pengembangan Sistem *Prototyping*

Berdasarkan model *prototype* yang telah digambarkan diatas, maka dapat diuraikan pembahasan masing-masing tahap dalam model tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Komunikasi

- Tim pengembang perangkat lunak melakukan pertemuan dengan para *stakeholder* untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan sistem.
- 2) Perencanaan  
Pengembang membuat perencanaan mengenai *prototype* yang akan dibuat yang berfokus pada gambaran umum situasi implementasi *e-government* di Kota Palembang.
  - 3) Model Rancangan  
Pengembang membuat rancangan *prototype* yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
  - 4) Pembuatan *Prototype*  
Dalam tahapan ini *prototyping* yang sudah di sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai atau di kehendaki.
  - 5) Penyebaran, Pengujian Dan Umpan Balik  
Setelah sistem sudah menjadi satu perangkat yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan.

### 2.3 E-Government

*E-government* merupakan pembahasan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendefinisikan kembali layanan publik agar lebih mudah diakses, akuntabel, dan efektif. Ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi publik dan meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, *e-government* mendorong keterlibatan warga dalam administrasi publik karena sifat konsep *e-government* yang *multi-dimensi*. Hal ini mengarah pada identifikasi tiga klasifikasi utama *e-government*. Klasifikasi tersebut didasarkan pada sifat interaksi dalam sistem *Government To Business* (G2B), *Government To Governments* (G2G) dan *Government To Citizens* (G2C).[3]

- a. *Government To Business* (G2B) merupakan interaksi antara pemerintah dan dunia usaha guna membantu bisnis dalam berurusan dengan pemerintah secara lebih efektif. Contoh yang paling umum adalah layanan pengadaan elektronik. Layanan ini memungkinkan proses penawaran transparansi untuk semua bisnis dimana sebelumnya bisnis ini perlu terus menghubungi pemerintah untuk pembaruan selama proses penawaran.
- b. *Government To Governments* (G2G) memungkinkan berbagai informasi diantara organisasi publik hal ini berkaitan dengan pertukaran informasi antara lembaga pemerintah dan pegawai ditingkat provinsi dan lokal. Tujuan dari *Government To Governments* merupakan mencakup koordinasi yang lebih baik di antara badan pemerintah, prosedur standar dan efisiensi yang lebih besar bagi pemerintah untuk melayani publik dengan lebih baik.
- c. *Government To Citizens* (G2C) berfokus pada interaksi antara pemerintah dan warga. Hal ini merupakan penggunaan *e-government* untuk meningkatkan penyampaian layanan publik. Contohnya *Government To Citizens* memungkinkan warga atau masyarakat dapat melakukan partisipasi berupa bantuan maupun berkomentar sehingga pemerintah dapat menanggapi komentar dari masyarakat itu sendiri.

### 2.4 E-Government di Kota Palembang

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang berusaha untuk mengembangkan *e-government* di dalam urusan administrasi pada pemerintahannya. Tetapi, penggunaan *e-government* di kota Palembang masih banyak menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah dalam melakukan upaya penerapan *e-government* sehingga hal ini masih belum bisa berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan. Lokasi dan akses menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan *e-government* untuk memberikan layanan kepada masyarakat [4].

**Tabel 1. Aplikasi *E-government* di Kota Palembang**

No	Aplikasi	Deskripsi
1	Hallo Palembang	Hallo Palembang merupakan wadah untuk masyarakat Kota Palembang dalam mendapatkan informasi pelayanan yang diberikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
2	Sidemang	Sidemang merupakan akronim dari sistem informasi administrasi online masyarakat kota Palembang. Aplikasi Sidemang merupakan salah satu halaman website Hallo Palembang yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan berkas tanpa harus datang ke kantor pemerintahan masyarakat juga bisa mencetak sendiri berkasnya.

Menurut Antoni (2018) menginvestigasi *e-government* di Kota Palembang yang berjudul *Information Technology Governance Profil of E-Government*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

- 1) Dalam aspek pengadaan dan pengembangan, ringkasan jawaban responden dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dalam pengembangan IT e-pemerintah, pemerintah Kota Palembang harus memperhatikan investasi dan sumber daya oprasional untuk meningkatkan pelaksanaan IT *e-government* di lingkungan pemerintahan.
- 2) Dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian, ringkasan keseluruhan responden dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Palembang yang dalam hal IT e-pemerintah perencanaan masih kurang dalam penerapannya dan juga dalam hal pengorganisasian masih tampak kurang perhatian untuk pengembangan IT *e-government* di lingkungan pemerintahan.
- 3) Dalam aspek pelaksanaan dan manajemen, ringkasan keseluruhan responden dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam aspek pelaksanaan dan manajemen masih banyak yang belum diterapkan hanya karna terbatas pada perencanaan masa depan.
- 4) Dalam aspek pengawasan dan pengembangan, ringkasan keseluruhan responden dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Palembang dalam pengawasan dan pengembangan, masih ada kekurangan pada penghargaan dari segi IT *e-government* pembangunan sehingga *e-government* Palembang masih tidak mampu untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam kompetisi IT *e-government*.

## **2.5 Konsep *E-Government* Syariah *Fiqih Siyasah***

Menurut Nugraha (2018) *e-government* merupakan penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan layanan kegiatan di pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan penyampaian layanan efisiensi dan efektivitas.[5]

Menurut Sri Warjiyati (2018) dalam pandangan Islam *e-government* merupakan bagaimana cara mengoprasikan metode yang ada di dalam ilmu Usul Fikih bertujuan untuk menyusun prinsip yang ada di dalam hukum islam untuk menanggapi persoalan yang terjadi didalam pemerintahan. Hubungan *e-government* dan *fiqih siyasah* yaitu terletak pada bentuk pengendalian, pelaksanaan serta kebijakan di sebuah negara ataupun wilayah. Didalam ajaran *fiqih siysah* kebijakan maupun

keputusan akan mengikuti ajaran islam maupun wahyu ilahi (*top down*) sedangkan *good government* merupakan sebuah pemikiran manusi (*bottom up*) [6].

#### **a. Pengendalian (*Steering*)**

Pengendalian merupakan sesuatu yang dilakukan agar tujuan yang telah di rencanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga mencapai target yang di inginkan. Contohnya pendiri kantor pemda baru pasti memiliki tujuan tersendiri dalam menciptakan lembaga baru sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang belum bisa di capai oleh organisasi lama namun target tersebut membutuhkan rencana, program serta aktivitas utama yang akan dilakukan. Namun untuk mencapai rencana, program serta aktivitas tersebut memerlukan pengelolaan manajemen supaya tujuan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Dibawah ini terdapat beberapa contoh pengendalian manajemen di pemerintahan yaitu:

- a) Koordinasi, misalnya program bantuan sosial lintas kementerian/Lembaga dan Pemda.
- b) Komunikasi, misalnya terdapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh kementerian keuangan dan pelaporan laporan kinerja.
- c) Pengambilan keputusan, misalnya pilihan pelaksanaan proyek, alokasi dana saat bencana alam.
- d) Pengendalian dan penilaian kinerja entitas tertentu, misalnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau laporan kinerja lain.

Dalam hal ini pemerintah diarahkan untuk melakukan pengendalian (*steering*) dan kolaborasi mengingat dinamika masyarakat seperti pola intraksi saling mengendalikan diantara berbagai faktor yang terlibat atau yang berkepentingan dalam suatu bidang tertentu. Pengendalian merupakan suatu yang bisa di monitoring atau yang bisa di kendalikan seperti evaluasi kinerja pegawai contohnya tugas apa saja telah di selesaikan, penilaian dan pengendalian bisa di lakukan dengan cara membuat program kerja seperti membuat jadwal atau target yang akan di laksanakan.

#### **b. Pelaksanaan**

*E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*moderen*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas layanan yang selama berjalan. Berdasarkan sifat transaksi informasi, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan yaitu :

- a) Persiapan, misalnya pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM dan penyiapan sarana akses yang mudah contohnya menyediakan sarana *Multipurpose community Center, SME-Center*, dan lain-lain, serta melakukan sosialisasi untuk situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- b) Pematangan, misalnya pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- c) Pemantapan, misalnya pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan *interoperabilitas* aplikasi dan data dengan lembaga lain.
- d) Pemanfaatan, misalnya pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers (G2C)* yang terintegrasi dan situs pemerintah pusat atau daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat-4.

Terkait dengan strategi tahapan pengembangan yang di laksanakan inpres, menurut Sri Handyaningsih (2007) pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan budaya yaitu Tahapan Inisiasi, Tahapan Interaksi, Tahapan Transaksi dan Tahapan Pelayanan.

Hakikat pemerintahan yang baik dalam ajaran fikih, pada aturannya belum ditemukan pendekatan yang normal. Namun terdapat ayat yang mengidkasikan adanya persoalan pemerintahan

yang baik dalam anjuran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-Hajj/QS.22:41,

الَّذِينَ إِذْ مَكَنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Al-ladziina in makkannaahum fiil ardhil aqaamuush-shalaata waaatawuuzzakaata wa-amaruu bil ma'ruufi wanahau 'anil munkari walillahi 'aaqibatul amuur(i);

**Artinya :** orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dalam ayat tersebut tercantum arti yang menerangkan adanya permasalahan pada pemerintahan yang baik dalam pandangan fiqih, karena melaksanakan wewenang kekuasaan untuk mengelola pengembangan dengan berorientasi pada penata suasana kondusif bagi masyarakat dalam memenuhi keinginan spiritual dan rohani nya dapat ditandai dengan menegakkan sholat, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, serta menciptakan kestabilan politik dan keamanan dapat di ilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian dalam ayat tersebut menyusun pemerintahan yang baik dengan beberapa aspek yaitu *Spiritual Governance*, *Economic Governance* dan *Political governance*.

### c. Kebijakan

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No 03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *e-government* yang menyebutkan terdapatnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif yaitu :

- 1) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepinginan masyarakat luas di seluruh wilayah negara dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif.
- 2) Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka di dengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Beberapa contoh penerapan *e-govenment* yang ada di Indonesia yaitu *One Stop Service (OSS)* yang merupakan layanan perijinan terpadu dan *E-Procurement* yang menampilkan informasi proyek pemerintah secara terbuka sehingga masyarakat dapat turut serta untuk melakukan tender proyek tersebut. *E-government* tentunya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perusahaan yang sudah mendukung *e-government* yaitu *Gamatecho* melalui beberapa layanan seperti *mCity* dan *gtPerijinan*.

Dalam perspektif hukum Islam, pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at (*maqashid syariah*). Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam konsep masalah juga dibahas dalam kaidah qowaid fiqiyah, yaitu:

تصرف الامام علي الراعية منوط بالمصلحة

**Artinya :** "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan Kemaslahatan".

Kaidah ini adalah kaedah khusus dalam bidang siyasah. Maksud kaedah ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. *Good governance* yang diwacanakan dan diterapkan dalam birokrasi sebagai sebuah upaya dari pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi masalah. Penguatan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan birokrasi publik menjadikan lembaga semakin kuat dan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal.

Berdasarkan penjelasan pada penelitian yang dibuat maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep *e-government syariah fiqh siyasah* memiliki 3 tahapan yaitu pengendalian, pelaksanaan dan kebijakan pada tabel 1.1 dibawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang atribut apa saja yang terdapat pada tahapan-tahapan tersebut.

**Tabel 2. Kesimpulan dari Pengendalian, Pelaksanaan dan Kebijakan**

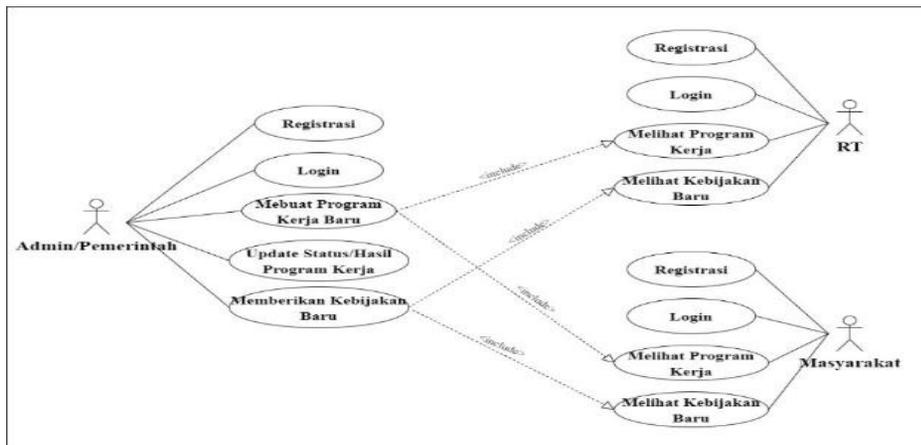
No	<i>E-government Fiqih Siyasah</i>	Atribut
1	Pengendalian	Sesuatu yang di monitor atau yang bisa dikendali kan seperti evaluasi kinerja pegawai misalnya membuat jadwal atau target yang akan di laksanakan.
2	Pelaksanaan	Target apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah dari program kerja yang telah di tentukan pemerintah.
3	Kebijakan	Peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh pemerintah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perancangan Sistem

##### *Usecase Diagram*

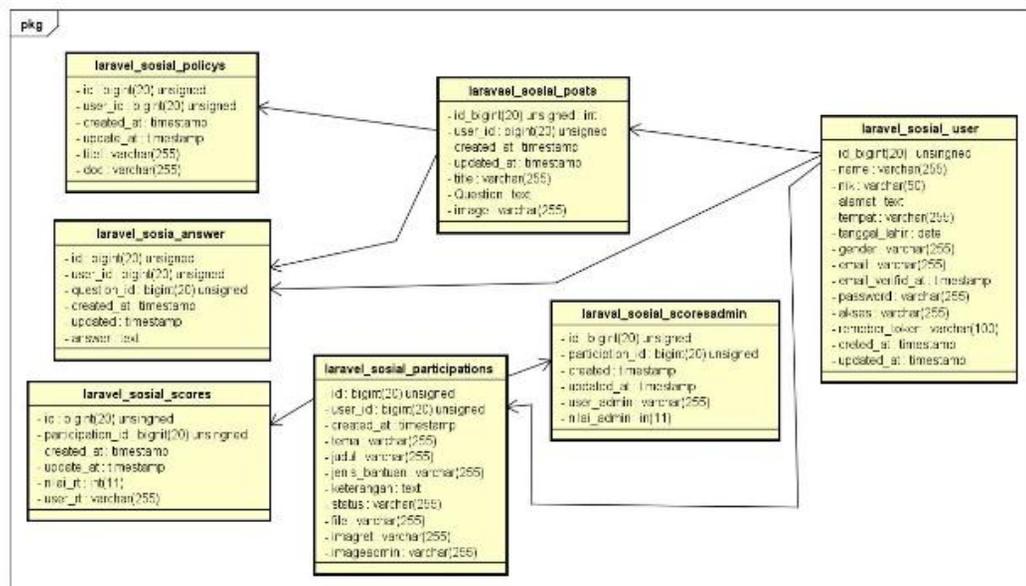
*Usecase Diagram* merupakan bagaimana alur yang akan dilakukan di dalam sistem *website* yang dibangun serta aktor mana saja yang dapat berinteraksi dengan sistem. *Usecase diagram* merupakan alur kerja dari Admin/Pemerintah, Rt dan Masyarakat. Dibawah ini merupakan *usecase diagram* dari *website* yang akan di buat. Adapun hasil *Usecase diagram* yang dibuat bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Use Case Diagram**

### Class Diagram

Class Diagram adalah rancangan *database* pada sistem yang akan dibuat serta menampilkan berbagai kelas yang ada di dalam aplikasi yang akan dibuat. *Class* diagram merupakan gambaran relasi tabel di dalam aplikasi yang dibangun. Adapun hasil *class* diagram yang dibuat bisa dilihat pada gambar 3 ini:



Gambar 3. Class Diagram

### Activity Diagram

#### Activity Diagram Registrasi Admin/Pemerintah

Merupakan penjelasan proses apa saja yang harus dilakukan oleh admin/pemerintah saat ingin mendapatkan hak izin akses login di *website* yang akan digunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. Activity Diagram Registrasi Admin/Pemerintah

### Activity Diagram Program Kerja Pemerintah

Merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus di lakukan admin/pemerintah saat ingin membuat program kerja pemerintah di *website* yang akan digunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 5. *Activity Diagram* Program Kerja Pemerinta

### Activity Diagram Update Hasil Program Kerja

Merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus di lakukan admin/pemerintah saat ingin melakukan *update* pada hasil program kerja yang telah di lakukan oleh pemerintah di *website* yang akan digunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 6. *Activity Diagram* Update Hasil Program Kerja

### Activity Diagram Kebijakan Terbaru

Merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus di lakukan admin/pemerintah saat ingin membuat kebijakan baru di *website* yang akan di lakukan. Untuk lebih detainya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 7. Activity Diagram Kebijakan Terbaru

### 3.2 Implementasi

Implementasi pada aplikasi ini merupakan hasil dari rancangan dan desain yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP serta *framework Laravel* dengan menggunakan kedua teknologi tersebut maka aplikasi yang dibangun dapat dijalankan pada *web browser*.

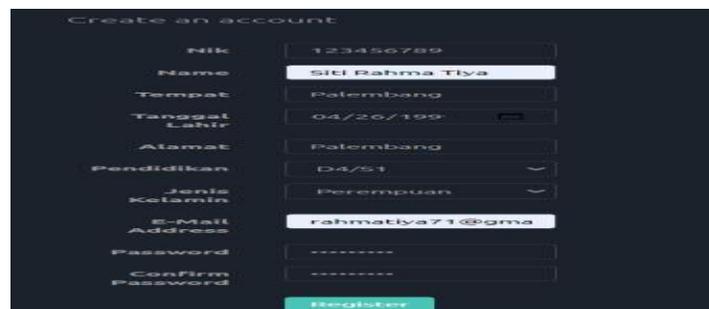
### 3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem yaitu proses pengujian sistem yang dibangun apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dan apakah layak untuk digunakan. Pengujian sistem dilakukan dengan cara menguji setiap proses dengan kemungkinan terdapat kesalahan di setiap prosesnya.

### 3.4 Implementasi Tampilan

#### 1) Tampilan Interface Registrasi

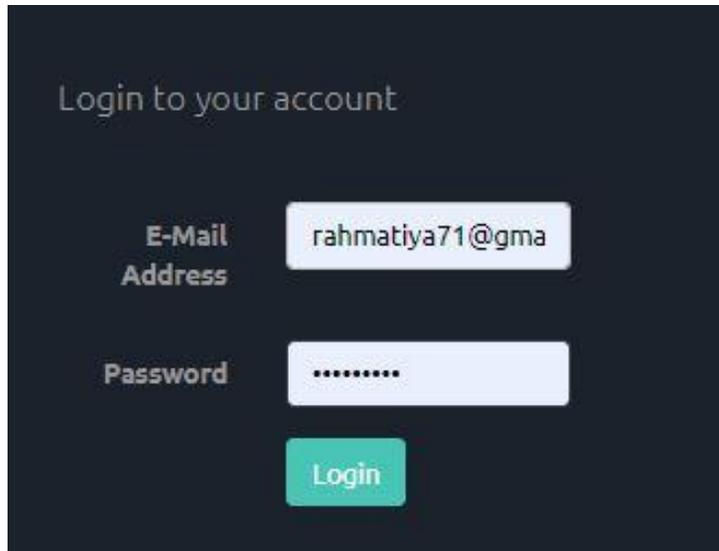
Form *registrasi* merupakan langkah awal untuk mendapatkan hak akses masuk setelah aplikasi terbuka. Pemerintah, RT maupun Masyarakat diwajibkan untuk melakukan *registrasi* agar bisa melanjutkan ke halaman utama.



Gambar 8. Tampilan Interface Registrasi

## 2) Tampilan *Interface Login*

Form login merupakan langkah untuk masuk ke halaman *dashbord* di website yang di buat. Admin/pemerintah, RT dan Masyarakat harus memasukkan *E-mail* serta *Password* agar bisa masuk ke halaman utama website.



Login to your account

E-Mail Address: rahmatiya71@gma

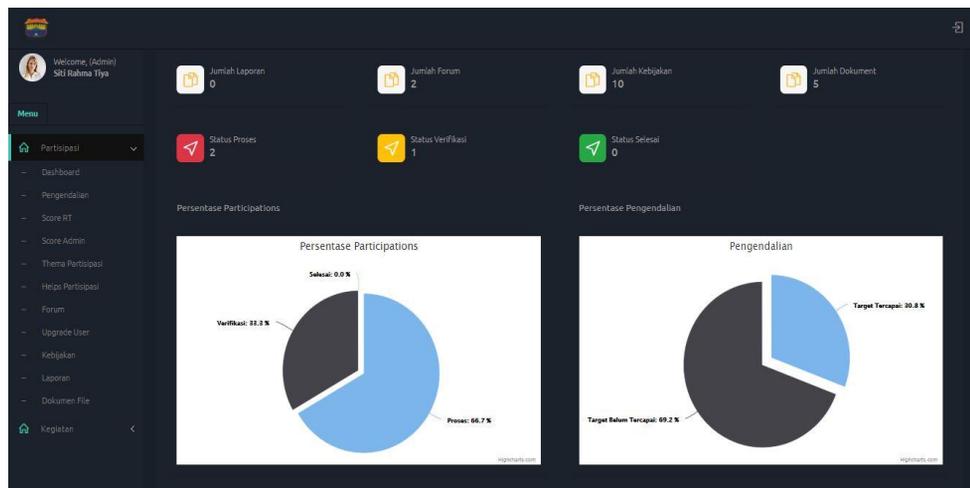
Password: .....

Login

Gambar 9. Tampilan *Interface Login*

## 3) Tampilan Form *Dashbord Admin*

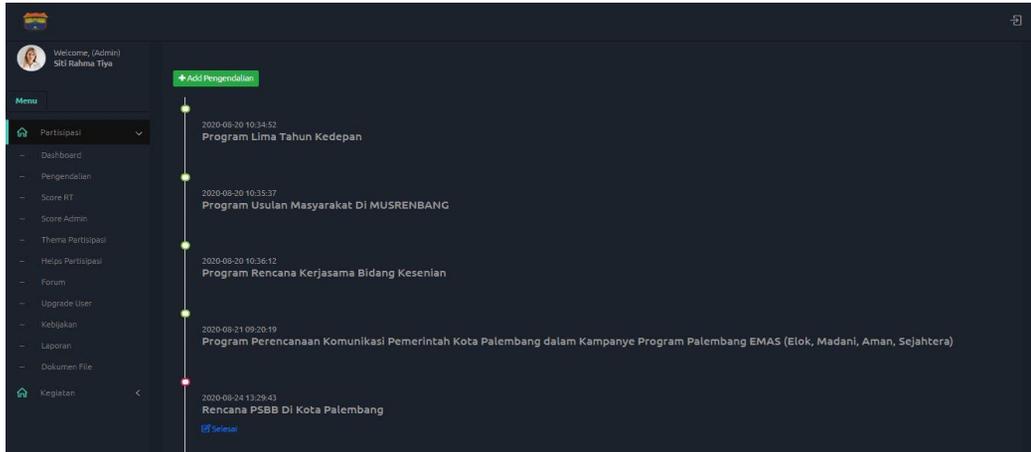
Halaman dashbord merupakan halaman yang akan ditampilkan setelah admin login. Terdapat beberapa menu yang di perlukan oleh admin yaitu Pengendalian, Score RT, Score Admin, Tema Partisipasi, Help Partisipasi, Forum, *Upgrade User*, Kebijakan, Laporan, Dokumen File.



Gambar 10. Form *Dashbord Admin*

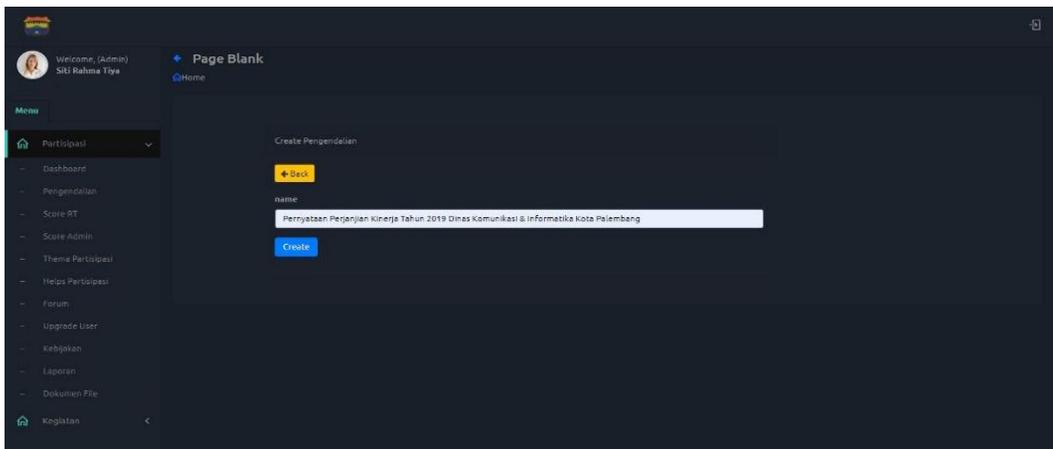
#### 4) Tampilan Form Menu Pengendalian

Halaman Pengendalian merupakan halaman hasil *input* pengendalian atau program kerja pemerintah. Pada halaman ini dapat melihat program kerja apa saja yang telah dilakukan serta pada halaman ini dapat melakukan *update* program kerja jika dirasa program kerja telah diselesaikan.



Gambar 11. Tampilan Form Tambah Pengendalian

Tambah pengendalian merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan pengendalian/program kerja baru yang direncanakan oleh pemerintah.



Gambar 12. Tampilan Form Menu Kebijakan

Halaman kebijakan merupakan halaman yang terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga admin menginputkan di halaman ini agar masyarakat dapat melihat kebijakan apa saja yang di dikeluarkan oleh pemerintah.

No	Judul	Dokument
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	1598275676,1
2	PERSIAPAN ASIAN GAMES 2018 (ENERGY OF ASIA) DI KOTA PALEMBANG	1598275414,1
3	DUKUNGAN MENINGKATKAN KESADARAN PESERTA MEMBAYAR IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	1598275318,1
4	KEWAJIBAN MENJADI PESERTA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	1598275186,1
5	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	1598275077,1
6	PENGATURAN PARKIR DISEPUTAR KANTOR WALKOTA, JALAN MERDEKA DAN SEKITARNYA	1598274939,1
7	PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA PARIWISATA DAN SERTIFIKAT USAHA DI BIDANG PARIWISATA	1598274479,1
8	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRINGKAT KELURAHAN, KECAHATAN DAN KOTA PALEMBANG	1598253696,1
9	PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN MENJUJU MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA PALEMBANG	1598253635,1
10	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	C:\vampp\m

**Gambar 13. Form Menu Kebijakan**

### 5) Tampilan Form Tambah Kebijakan

Pada halaman tambah kebijakan digunakan untuk menambahkan kebijakan baru yang di keluarkan pemerintah untuk masyarakat.

Create New Policy

[Back](#)

Title  
 PERSIAPAN ASIAN GAMES 2018 (ENERGY OF ASIA) DI KOTA PALEMBANG

Dokument  
 Choose File 0E-04.A-2018\_compressed.pdf

[Create](#)

**Gambar 14. Form Tambah Kebijakan**

#### 4. KESIMPULAN

Kualitas pelayanan adalah salah satu hal penting dalam memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan tersebut. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sehingga pemerintah mendapatkan *feedback* dari proses pelayanan tersebut guna sebagai bahan evaluasi di penelitian selanjutnya. Adapun hasil dari penelitian ini merupakan aplikasi pelayanan terpadu berbasis website guna untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan kontroling baik dalam semua kegiatan maupun transparansi dana. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi serta dalam aplikasi ini juga terdapat layanan publik yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi mau pun menyampaikan pendapat ke pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Bardadi and M. A. Firdaus. 2010. "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERKULIAHAN PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA," *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 2, no. 1, p. 10, 2010.
- [2] E. Sudarsono, D. Antoni, and M. Akbar, "TATAKELOLA GREEN E-GOVERNMENT DI KOTA PALEMBANG," p. 6, 2018.
- [3] A. Sabani, H. Deng, and V. Thai, "Evaluating the Development of E-Government in Indonesia," p. 5.
- [4] "1st Revised IT Governance of E-government in Palembang.en.id.docx." .
- [5] Joko Tri Nugraha. 2018. "E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN) (1).pdf." .*Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.
- [6] S. Warjiyati, 2018. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK," *HUKUM ISLAM*, vol. 18, no. 1, p. 119, Oct. 2018, doi: 10.24014/hi.v18i1.5429.
- [7] H. N. Syaddad, 2017. "RANCANG BANGUN DIGITAL ARCHIVING DI PERGURUAN TINGGI MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE MODEL STUDI KASUS: UNIVERSITAS SURYAKANCANA," p. 9, 2017.